

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), KOMPLEKSITAS DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia periode 2011-2012)**

Oleh :

Fitriatul Aini

Pembimbing : Yuneita Anisma dan Meilda Wiguna

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia.

Email : aini.fitriatul28@gmail.com

The Effects of Economic Growth, Region Own Source Revenue (PAD), Regional Complexity, and Capital Expenditure toward Internal Control Weakness of Regional Government (An Empirical Study on The Provincial Level Of Regional Government on Period 2011-2012)

ABSTRACT

This study aims to examine and obtain empirical evidence about the affecting factors that might influence internal control weakness. Those factors are economic growth, Region Own Source Revenue (PAD), complexity, and capital expenditure. Population of this study is the provincial level of government throughout Indonesia consisting of 33 provinces during 2011-2012 period. This research was carried out using secondary data from financial reports that are available in BPK's website, Gross Domestic Regional Product (PDRB) report, realisation of regional government budget and data of number of municipalities (consists of districts and cities) throughout Indonesia and was analysed using multiple regression analysis with help of software SPSS version 20,0. The result shows that economic growth takes effect negatively-insignificant on internal control weakness at $0,090 > 0,05$ level of significance. Region Own Source Revenue (PAD) takes its effect negatively-significant on internal control weakness at $0,001 < 0,05$ level of significance. Complexity reacts positively-significant to internal control weakness at $0,000 < 0,05$ level of significance. And level significance while capital expenditure doesn't take any effect on internal control weakness at $0,527 > 0,05$.

Keywords: Internal Control Weakness, Economic Growth, PAD, Complexity, and Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Dengan adanya otonomi daerah di Indonesia, maka dengan tegas terjadi pemisahan fungsi antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Pemisahan fungsi tersebut yakni eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang

merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dengan adanya pemisahan fungsi tersebut, maka dibutuhkan sebuah sistem *internal control* yang mampu mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pemerintah menetapkan adanya suatu sistem pengendalian intern yang harus dilaksanakan. Sistem pengendalian intern yang dimaksud adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern suatu organisasi yang baik akan memperkecil tingkat terjadinya kecurangan dalam organisasi. Begitupun sebaliknya, jika pengawasan yang tidak memadai dan sistem pengendalian intern yang lemah akan memicu terjadinya kecurangan, apalagi dengan banyaknya jumlah pemerintahan daerah di Indonesia dengan otonomi yang juga semakin besar, maka dibutuhkan pengawasan yang baik dan memadai agar tidak terjadi berbagai bentuk kecurangan.

Namun, menurut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2011-2013 kasus yang terkait kelemahan sistem pengendalian intern terus meningkat,

yang membuktikan tidak sesuai dengan tekad pemerintah yang ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan juga akuntabel.

Terdapat beberapa kajian mengenai faktor-faktor penentu yang menyebabkan lemahnya sistem pengendalian intern. Diantaranya pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, kompleksitas daerah dan belanja modal. Faktor-faktor tersebut akan digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah? 2) Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah? 3) Bagaimana pengaruh kompleksitas daerah terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah? 4) Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah?

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. 2) Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. 3) Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kompleksitas daerah terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. 4) Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh belanja modal

terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan, yaitu: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (IAPI, 2011: 319.2).

Dalam penjelasan umum PP No 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah dikenal sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, dimana pengelolaan keuangan Negara dapat dilaporkan secara andal, asset negara dapat dikelola dengan aman, dan tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kelemahan Pengendalian Intern

Dalam IAPI (2011: 319.6), kelemahan pengendalian intern dinyatakan bahwa terdapat keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern itu sendiri, terlepas dari bagaimana bagus desain dan operasinya. Karena hal ini terkait dengan pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan yang dapat saja salah, dan pengendalian intern tersebut dapat rusak karena kegagalan yang bersifat

manusiawi seperti kekeliruan dan kesalahan yang sifatnya sederhana.

BPK menyatakan lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI yang didesain untuk mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan (BPK, 2014: 3). Kelemahan atas SPI tersebut dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: (1) Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, (2) Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, (3) Kelemahan struktur pengendalian intern.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006: 9).

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja perekonomian, maka dibuat indikator makro yang biasa digunakan sebagai penilaian kinerja perekonomian. Indikator makro tersebut diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (BPS, 2008: 3). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi didalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa memperhitungkan kepemilikan (BPS, 2008:5).

PDRB yang tinggi mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi daerah berjalan dengan baik, dengan begitu nilai pemasukan

terhadap pendapatan daerah akan semakin tinggi. Namun, meningkatnya aktivitas ekonomi suatu daerah juga akan mempengaruhi pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah. Meningkatnya aktivitas ekonomi bisa meningkatkan angka kecurangan yang terjadi. Pemerintah tidak bisa fokus terhadap pengawasan yang dilakukannya karena begitu banyaknya segmen usaha yang harus mereka awasi. Sehingga menuntut penyesuaian dari pengendalian intern yang dimiliki dan membutuhkan waktu untuk mengimplementasikan prosedur yang baru. Hal ini memungkinkan pengawasan intern menjadi tidak berjalan secara optimal sehingga terjadinya masalah-masalah dalam organisasi yang menjadikan lemahnya pengendalian intern itu sendiri.

Dalam penelitian terdahulu, Hartono, dkk. (2014) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern. Sedangkan Martani dan Zaelani (2011) menemukan hubungan positif signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan pengendalian intern.

H1: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dipisahkan menjadi dua, yaitu:

Pendapatan Asli Daerah sendiri yang sah dan pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah. Menurut Nurcholis (2007: 182), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Juliawati, *et al*, 2012).

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.

Kompleksitas Daerah

Kompleksitas pemerintahan daerah dapat dilihat dari berbagai aspek. Semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan memiliki area kerja yang tersebar akan semakin sulit pengendalian intern dijalankan. Organisasi menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengimplementasikan pengendalian intern secara konsisten untuk setiap divisi yang berbeda. Dan kesulitan juga akan muncul ketika akan memulai konsolidasi laporan keuangan dari berbagai divisi atau

cabang organisasi (Martani dan Zaelani 2011).

Restuningdiah dan Indriantoro (2000) menyatakan bahwa peningkatan kompleksitas dalam suatu tugas atau sistem, akan menurunkan tingkat keberhasilan tugas itu. Terkait dengan kegiatan pengauditan, tingginya kompleksitas audit ini dapat menyebabkan akuntan berperilaku disfungsi sehingga menyebabkan penurunan kepuasan kerja auditor dalam pembuatan keputusan dalam audit.

H3: kompleksitas daerah berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern

Belanja Modal

Belanja modal menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah bagian dari kelompok belanja daerah, yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari duabelas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Darise, 2008: 46). Belanja modal biasanya terkait erat dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Semakin banyak jumlah belanja modal yang dimiliki suatu daerah maka alokasi untuk pengadaan aset tetap semakin tinggi. Proses pengadaan aset tetap dalam lingkungan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme lelang atau tender. Dalam proses tender, perusahaan yang memenuhi persyaratan dan mampu melakukan penawaran terbaik akan dipilih untuk memegang proyek pengadaan aset tetap tersebut. Proyek pengadaan barang ini yang sangat rawan terjadi kecurangan yang merugikan pemerintah. Logikanya dengan banyaknya proyek pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka kemungkinan terjadinya kecurang dalam proyek pengadaan tersebut semakin tinggi.

H4: belanja modal berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah provinsi yang terdapat di Indonesia pada tahun pengamatan 2011-2012 yaitu 33 provinsi. Sedangkan sampel penelitian dipilih dengan pendekatan *purposive sampling*, artinya sampel yang digunakan adalah sampel yang memenuhi kriteria tertentu. Berdasarkan proses pemilihan sampel, dari 33 populasi yang tersedia, diperoleh seluruh populasi sebagai sampel dalam 2 periode, sehingga sampel yang dapat digunakan sebanyak 66 sampel. Kemudian, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan teknik pengumpulan data secara

dokumentasi yang diakses langsung melalui *website* BPK, www.bpk.go.id.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Kelemahan Pengendalian Intern

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

Kelemahan pengendalian internal diukur dengan jumlah item kelemahan SPI yang dilaporkan oleh BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan. Dengan perhitungan sebagai berikut:

Kelemahan SPI = Jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan + Jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja + Jumlah kasus kelemahan struktur pengendalian

Pertumbuhan Ekonomi (X1)

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006: 9).

Variabel ini dapat diukur dengan laju pertumbuhan PDRB, yaitu dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu dengan PDRB sebelumnya seperti yang digunakan oleh Martani dan Zaelani (2011) dengan rumus:

$$PE = \frac{\text{PDRB}_{t} - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

PAD (X2)

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, PAD adalah salah

satu pendapatan daerah yang diperoleh dengan mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diukur dengan membandingkan dengan jumlah pendapatan Pemerintah Daerah sehingga terbentuk persentase PAD (Kristanto, 2009). Oleh karena itu, variabel ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan}} \times 100\%$$

Kompleksitas Daerah (X3)

Kompleksitas dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat beragam faktor dengan karakteristik berbeda-beda yang mempengaruhi pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penelitian ini pendekatan terhadap variabel kompleksitas menggunakan jumlah pemerintah daerah kabupaten dan kota yang dimiliki dalam suatu provinsi.

Belanja Modal (X4)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2012) menyatakan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai belanja modal. Dimana realisasi belanja modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, untuk variabel ini diukur dengan rumus sebagai berikut:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis statistik ini digunakan untuk memberikan gambaran dari suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi (SD). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pertumbuhan ekonomi, PAD, kompleksitas, dan belanja modal sebagai variabel independen, serta kelemahan pengendalian intern sebagai variabel dependen. Variabel tersebut telah diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Dev.
PE(X1)	66	-.05	.27	.0661	.03782
PAD (X2)	66	.04	.77	.4015	.19584
Kom.(X3)	66	1.00	39.00	15.742	9.0406
B. M (X4)	66	.07	.51	.2164	.08923
K. SPI (Y)	66	20.00	422.00	173.545	99.966
Valid N	66				

Sumber : data sekunder yang diolah 2016

Hasil Pengujian Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau variable residual memiliki distribusi

normal. Uji statistik nonparametrik *Kolmogorov Smirnov* (K-S) digunakan dalam penelitian ini. Bila probabilitas signifikansi > 0.05 maka distribusi datanya normal, dan jika besarnya nilai signifikansi < 0.05 maka distribusinya tidak normal (Ghozali, 2013: 98)

Tabel 2
One-sample Kolmogrov-Smirnov Test

Model	Nilai Sig.Kolmogrov-Smirnov	Keterangan
1	0.953	Data Berdistribusi Normal

Sumber: data yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 2, diperoleh nilai signifikansi untuk *Unstandardized Residual* sebesar 0.953, lebih besar dari nilai signifikansi yang diharapkan yaitu 0.05 ($0.953 > 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa data residual pada penelitian ini berdistribusi normal.

Hasil Pengujian Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengolahan data, pada tabel 3 dapat dilihat hasil dari uji multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tol.	VIF	Keterangan
Pert. Ekonomi	.944	1.059	Tidak terjadi multikolinearitas
PAD	.910	1.099	Tidak terjadi multikolinearitas
Kompleksitas	.764	1.308	Tidak terjadi multikolinearitas
Belanja Modal	.829	1.207	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: data sekunder yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji multikolinearitas meunjukkan nilai *tolerance* > 0.1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 untuk

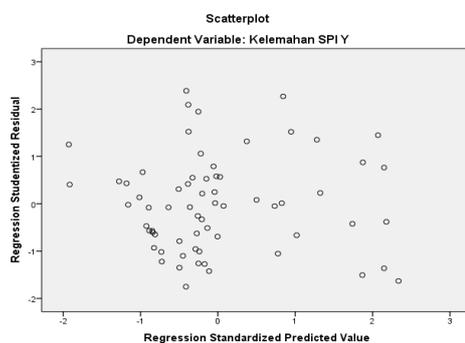
setiap variabel. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat problem multikolinearitas antar variabel independen dan layak digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedasitas, dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZEPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized*. Dasar pengambilan keputusannya jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 1

Hasil Pengujian Heterokedastisitas



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016.

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada gambar 1 dapat dilihat bahwa grafik *scatterplot* menunjukkan data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal

ini berarti model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model ini layak digunakan untuk memprediksi kelemahan pengendalian intern berdasarkan variabel yang mempengaruhinya dalam penelitian ini.

Hasil Pengujian Autokorelasi

Berikut ini adalah hasil uji statistik mengenai ada tidaknya autokorelasi pada penelitian ini.

Tabel 4

Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson	Keterangan
1	1.972	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 4, diketahui nilai d hitung (*Durbin-Watson*) terletak antara -2 sampai dengan +2 yaitu 1.972. dapat disimpulkan, tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian ini.

Pengujian Kelayakan Model

Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

Tabel 5

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R ²	Adj. R ²	Std. Error
1	.894 ^a	.800	.787	46.14062

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal (X4), Pertumbuhan Ekonomi (X1), PAD (X2), Kompleksitas (X3)

b. Dependent Variable: Kelemahan SPI Y
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016.

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*adjusted R²*) yang diperoleh sebesar 0,787. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen adalah sebesar 78,7%. Sedangkan sisanya 21,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan atau diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Setelah model regresi dinyatakan layak, maka akan dilakukan pengujian terhadap setiap masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yaitu antara pertumbuhan ekonomi dengan kelemahan pengendalian intern, PAD dengan kelemahan pengendalian intern, kompleksitas dengan kelemahan pengendalian intern, dan belanja modal dengan kelemahan pengendalian intern. Pengujian ini akan menggunakan uji-t.

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa koefisien regresi, nilai t dan signifikansi adalah seperti pada tabel 6 berikut :

Tabel 6
Persamaan Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Stand. Coeff.	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	62.068	29.001		2.140	.036
Pert. Ekonomi (X1)	-268.540	155.732	-.102	-1.724	.090
PAD (X2)	-102.858	30.637	-.202	-3.357	.001
Kompleksitas (X3)	10.215	.724	.924	14.109	.000
Belanja Modal (X4)	44.832	70.462	.040	.636	.527

a. Dependent Variable: Kelemahan SPI(Y)

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016.

Dari tabel 6 terlihat bahwa nilai t hitung dari masing-masing variabel pertumbuhan ekonomi (X1), PAD (X2), kompleksitas (X3), dan belanja modal (X4) adalah -1.724, -

3.357, 14.109, dan 0.636. Serta signifikansinya masing-masing 0.090, 0.001, 0.000 dan 0.527.

Hasil dari persamaan regresi dari tabel 6 adalah sebagai berikut

$$Y = 62,068 + (-268,540)X_1 + (-102,858)X_2 + (10,215)X_3 + (44,832)X_4 + e$$

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Berdasarkan pengujian pada tabel 6, diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai regresi negatif sebesar -268,540 dengan nilai t_{hitung} (1,724) < t_{tabel} (2,04) dengan tingkat signifikansi sebesar 0.090. tingkat signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05, dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap SPI.

Dari hasil hipotesis di atas, diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Artinya, jika terjadi kenaikan ataupun penurunan pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah, belum tentu akan menyebabkan naiknya angka kelemahan pengendalian intern.

Pengaruh PAD terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Berdasarkan pengujian pada tabel 6, diperoleh bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern. PAD memiliki regresi negatif sebesar 102,858 dengan nilai t_{hitung} (-3,357) > t_{tabel} (2,04) dan tingkat signifikansi sebesar 0.001. tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05. dengan

demikian H₂ diterima yang berarti PAD memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Kristanto (2009).

Dari hasil hipotesis di atas, diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang tinggi tidak menyebabkan angka kasus terkait kelemahan pengendalian intern meningkat, namun sebaliknya. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi berarti membuat sumber pendapatan daerah menjadi besar sehingga masalah terkait kelemahan pengendalian intern semakin kecil. Karena pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan pengendalian intern guna melindungi pos-pos penerimaan daerah. Dan juga karena sejak makin maraknya penangkapan pejabat daerah ke pengadilan akibat kasus korupsi terhadap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), membuat PAD sebagai salah satu objek korupsi mendapat perhatian khusus dengan tujuan agar pemerintah daerah efektif dalam melakukan kebijakan demi kepentingan rakyat. Sehingga dengan perhatian khusus tersebut pejabat daerah menjadi bekerja sesuai prosedur tanpa ada penyelewengan sehingga meminimalkan terjadinya kasus kelemahan pengendalian intern.

Pengaruh Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Berdasarkan pengujian pada tabel 6, diperoleh bahwa kompleksitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. profitabilitas memiliki regresi positif sebesar 10,215 dengan nilai t_{hitung} (14,109) > t_{tabel} (2,04) dan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Tingkat

signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian H₃ diterima, yang berarti kompleksitas berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.

Dari hasil pengujian hipotesis di atas, ditemukan bukti bahwa kompleksitas pemerintah daerah (jumlah kabupaten dan kota) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Alasan yang mendasari adalah semakin banyak jumlah kabupaten dan kota dalam suatu pemerintah daerah provinsi, akan membuat kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan karena memiliki area kerja yang tersebar dan beragam sehingga membuat pengendalian intern sulit untuk dijalankan. Seperti dalam konsolidasi laporan keuangan dari banyaknya kabupaten dan kota yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, akan ada masalah-masalah seperti keterlambatan atau tidak tepat waktunya saat pelaporan.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Hartono, dkk (2014) dan Puspitasari (2013) yang menyimpulkan semakin kompleks suatu pemerintahan, maka akan semakin meningkat kasus terkait kelemahan sistem pengendalian intern. Namun berbeda dengan hasil penelitian Susiarini dan Kiswanto (2016) yang menemukan bahwa kompleksitas daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Hartono dkk. (2014) mengukur kompleksitas pemerintah daerah dengan jumlah kecamatan, dan menemukan bahwa jumlah kecamatan yang banyak akan meningkatkan kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Sedangkan Puspitasari

(2013) mengukur kompleksitas dengan jumlah SKPD pada suatu daerah, dan menemukan bahwa semakin banyak segmen atau cabang organisasi maka kasus kelemahan pengendalian intern yang terjadi akan semakin banyak seperti kesulitan implementasi sistem pengendalian intern di lingkungan yang berbeda, masalah pengawasan dari pemerintah daerah sampai saat pelaporan.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Berdasarkan pengujian pada tabel 6, diperoleh bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Belanja modal memiliki regresi sebesar 44,832 dengan nilai t_{hitung} (0,636) < t_{tabel} (2,04) dan tingkat signifikansi sebesar 0.527. tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05. dengan demikian H_4 ditolak yang berarti belanja modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.

Dari hasil pengujian di atas, ditemukan bahwa tingginya belanja modal tidak berpengaruh terhadap jumlah kasus kelemahan pengendalian intern. Secara teoritis, seharusnya belanja modal berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern, karena pada sistem otonomi daerah yang berlaku di Indonesia saat ini seluruh kewenangan keuangan ditangani oleh pemerintah daerah secara penuh, termasuk di dalamnya pengelolaan penerimaan daerah dan belanja modal. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam mengelola dan mengalokasikan ke dalam belanja-belanja sehingga diharapkan pemerintah daerah yang memiliki penerimaan dan belanja modal relatif besar juga memiliki sistem pengendalian internal yang

kuat, agar dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan baik. Namun, secara empiris menunjukkan hasil yang berbeda. Hal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya tingkat partisipasi publik atau masyarakat di Indonesia masih rendah yang masih menganggap bahwa penerimaan daerah dan belanja modal merupakan persoalan yang tidak perlu publik ikut campur atau menegatuhinya. Sehingga pemerintah daerah akan menganggap bahwa transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah menjadi suatu hal yang tidak penting lagi. Hal ini menyebabkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan atau ketentuan intern pemerintah daerah tentang pendapatan dan belanja yang merupakan bentuk kelambatan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, bisa jadi tidak ditemukan karena rendahnya partisipasi publik akan hal ini. Sehingga membuat tinggi atau rendahnya belanja modal menjadi terlihat tidak berpengaruh terhadap jumlah kelemahan pengendalian intern.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil dari penelitian Kristanto (2009) yang juga menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Kristanto (2009) menyatakan bahwa dari data pemerintah daerah yang diteliti tidak terdeteksi adanya tindak korupsi atau kolusi oleh pejabat daerah, DPRD, dan pengusaha yang akan menimbulkan lemahnya pengendalian intern.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, kompleksitas daerah dan belanja modal terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah provinsi se-Indonesia periode 2011-2012. Berdasarkan hasil evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil pengujian pertama menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern nilai t_{hitung} (1,724) < t_{tabel} (2,04) dengan tingkat signifikansi sebesar 0.090.
2. Hasil pengujian kedua menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern dengan nilai t_{hitung} (-3,357) > t_{tabel} (2,04) dan tingkat signifikansi sebesar 0.001.
3. Hasil pengujian ketiga menunjukkan bahwa kompleksitas daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern, dengan nilai t_{hitung} (14,109) > t_{tabel} (2,04) dan tingkat signifikansi sebesar 0.000.
4. Hasil pengujian keempat menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern dengan nilai t_{hitung} (0,636) < t_{tabel} (2,04) dan tingkat signifikansi sebesar 0.527..

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Menambahkan cakupan sampel dan periode pengamatan yang lebih panjang sehingga hasil yang diperoleh akan lebih menjelaskan gambaran kondisi yang sesungguhnya.
2. Penelitian selanjutnya apabila menggunakan PAD dan belanja modal, diharapkan menggunakan banyaknya pos-pos penyusun PAD maupun belanja modal sebagai pengukurnya agar diperoleh data yang lebih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.
3. Menambahkan variabel lain sebagai faktor yang dapat mempengaruhi keberadaan pengendalian intern pemerintah daerah, seperti jumlah aset, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pertumbuhan, dan tingkat pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat (DAU).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2014. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2013*. Jakarta: Buku II Pemeriksaan Laporan Keuangan (Bab 3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).
- Darise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah*. PT Indeks
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Hartono, Mahmud dan Utaminingsih (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah*. SNA 17 Mataram Lombok
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. *“Standar Profesional Akuntan Publik”*. Jakarta: Salemba Empat. ISBN. 978-979-061-196-2.
- Julitawati, Ebit, Darwanis dan Jalaluddin. 2012. *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”*. Jurnal Akuntansi Pascasarjana. Universitas Syiah Kuala.
- Kristanto. 2009. *Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal*. Jurnal Akuntansi Ukrida, Volume 9, No.1, Januari 2009-ISSN: 1411-691X
- Martani dan Zaelani (2011). *Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Puspitasari, Titus. 2013. *Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kompleksitas Daerah (SKPD) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah*. Skripsi Sarjana. FEB Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Restuningdiah, Nurika dan Nur Indriantoro. 2000. *Pengaruh Partisipasi terhadap Kepuasan Pemakai dalam pengembangan Sistem Informasi dengan Kompleksitas Tugas, Kompleksitas Sistem, dan Pengaruh Pemakai sebagai Moderating Variable*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 3, No. 2: 119- 133.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*. Cetakan ketiga. Jakarta: Kencana.
- Susiarini, Dyah Rifka dan Kiswanto. 2016. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kelemahan pengendalian Internal Pemerintah Daerah di Jawa Tengah*. Vol.5, No.1. Abstrak Accounting Journal Analysis <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>.